

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Agensi

Menurut Luthans (2006), hubungan agensi mencakup satu individu atau lebih (pelaku) yang berhubungan dengan satu orang atau lebih (agen) untuk menunjukkan beberapa layanan yang diinginkan. Kunci teori Agensi adalah asumsi bahwa minat pelaku dan agen berbeda atau mungkin saling bertentangan satu sama lain. Dalam teori ini, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu pihak *principal* yang memberikan/ mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak *agent*. Salah satu contoh praktik dari teori Agensi ini yaitu hubungan antara pimpinan pemerintahan dengan masyarakat. Pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah bertindak sebagai *agent*, karena menyelenggarakan tanggungjawab pemerintahan sesuai dengan segala kepentingan masyarakat selaku *principal*. Masyarakat sebagai *principal* memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, sehingga *agent* memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Pelaporan hasil pelaksanaan pemerintahan ini dibuat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Adapun penjelasan masing-masing laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan, yaitu :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi/berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
4. Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik (laporan keuangan pemerintah daerah) harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh setiap pengguna. Selain itu, informasi publik juga harus dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Menurut Styles dan Tennyson (2007), salah satu cara yang paling nyaman dan menghemat biaya bagi instansi pemerintah untuk menyebarkan informasi adalah internet.

### **2.3. Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah**

*Government Finance Officers Association (GFOA)* (2009) menyebutkan bahwa penyebaran laporan keuangan pemerintah melalui internet mempunyai beberapa kelebihan, yaitu keteraksesan universal, meningkatkan kepedulian, meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah, menghemat biaya, meningkatkan interaksi dengan pengguna, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (GFOA, 2009). Salah satu bentuk pemanfaatan internet oleh

laporan keuangan perusahaan daerah, serta data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Informasi yang dimuat dalam SIKD merupakan data yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah meliputi :

- a) penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi pemerintah daerah.
- c) penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung sistem informasi keuangan daerah secara nasional.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa badan publik wajib memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

#### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Informasi keuangan daerah juga harus mudah diakses oleh masyarakat serta wajib diumumkan kepada masyarakat.

Ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh *leverage*, opini audit, dan kemandirian finansial pemerintah daerah.

##### 2.3.1. *Leverage*

Menurut Halim (2007), *leverage* adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang diberikan oleh pemilik (modal) dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (hutang). *Leverage* mengindikasikan sejauhmana utang digunakan dalam struktur modal suatu organisasi (Brigham dan Houston, 1998). Jika tingkat *leverage* yang semakin kecil, maka semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya, dan semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai biaya operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah tidak hanya dapat dipengaruhi oleh *leverage*, tetapi juga opini audit.

### 2.3.2. Opini Audit

Opini audit adalah pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diauditnya (Islahuzzaman, 2012). Menurut Rusmana, dkk (2017) opini audit merupakan pernyataan pendapat tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit (pernyataan pendapat) dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat macam opini yang akan diberikan pemeriksa, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan menolak memberikan opini. BPK memiliki beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan suatu opini, antara lain :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas dalam pengendalian internal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selanjutnya, LHP akan disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD sesuai dengan kewenangannya dan kepada pemerintah. Dalam rangka transparansi dan partisipasi publik, LHP yang telah disampaikan kepada pihak legislatif dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil pemeriksaan tersebut (Rusmana dkk, 2017). Ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah tidak hanya dapat dipengaruhi oleh opini audit, tetapi juga kemandirian finansial pemerintah daerah.

### 2.3.3. Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Menurut Mahsun, dkk (2013), penerimaan daerah meliputi :

1. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Penerimaan dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, diantaranya :
  - a) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  - b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam;
  - c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota;



- d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

## **2.4. Kerangka Konseptual**

### **2.4.1. Pengaruh *Leverage* terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2007), *leverage* adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang diberikan oleh pemilik (modal) dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (hutang). *Leverage* mengindikasikan sejauhmana utang digunakan dalam struktur modal suatu organisasi (Brigham dan Houston, 1998). Tingkat *leverage* yang semakin kecil, maka semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya, dan semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai biaya operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal.

Pengaruh *leverage* pada *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah yaitu besarnya hutang menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menyediakan *internet financial reporting*. Pemerintah daerah menjadi berhati-hati dalam menyediakan informasi mengenai hutang yang dimiliki karena tidak ingin kinerjanya dinilai buruk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* pemerintah daerah, maka

ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah akan cenderung lebih rendah.

#### **2.4.2. Pengaruh Opini Audit terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah**

Menurut Rusmana, dkk (2017) opini audit adalah pernyataan pendapat tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit (pernyataan pendapat) dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat macam opini yang akan diberikan pemeriksa, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan menolak memberikan opini.

Opini audit yang diberikan oleh BPK juga dapat mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) berarti terdapat suatu ketidaksesuaian, bisa dalam hal tidak sesuai dengan SAP, pengungkapan, peraturan perundang-undangan, atau hal lainnya. Dengan memperoleh opini selain WTP tersebut maka dapat diasumsikan bahwa pelaporan keuangan yang dihasilkan belum baik, sehingga dapat memicu ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah rendah.

### **2.4.3. Pengaruh Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman.

Kekayaan suatu daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hubungan yang positif dengan pengungkapan. Kemandirian finansial pemerintah daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan manajemen pemerintahan yang baik, yakni dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya sendiri dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya.

### **2.5. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Diani (2016) menganalisis determinan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia (Pulau Jawa). Penelitian ini dilakukan pada 95 *website*, dengan 58 pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan dan 37 lainnya tidak melakukan pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah dan kekayaan

pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Variabel kompetisi politik dan tipe pemerintahan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, sedangkan variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, dkk (2017) menganalisis pengaruh kompetisi politik, indeks pembangunan manusia (IPM), dan *leverage* terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. Populasi penelitian ini sebanyak 542 pemerintah daerah, dengan metode *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 51 pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. Variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah, sedangkan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian pemerintah daerah, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, dan pendapatan per kapita terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan pada situs dengan mengambil 257 sampel pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan

daerah (IKD) pada situs resmi pemda. Kemudian, rasio kemandirian pemda berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda, namun tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. Rasio pembiayaan hutang tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda, namun berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. Variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) menganalisis pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet: pengujian teori institusional dan keagenan. Sampel penelitian ini terdiri dari 78 pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah dan opini BPK berpengaruh negatif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* pemerintah daerah. Kemudian hutang pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, urbanisasi pemerintah daerah, tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah, tidak berpengaruh terhadap ketersediaan *internet financial reporting* pemerintah daerah. Variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* pemerintah daerah, dan variabel tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosita dan Arifin (2017) menganalisis determinan kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan 156 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2014 yang diperoleh langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan umur administratif terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan. Variabel kekayaan daerah, pendapatan per kapita dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Variabel *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2011) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia, dengan mengambil sampel sebanyak 85 pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik dan *leverage* tidak mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Variabel kekayaan pemerintah, ukuran pemerintah daerah, dan tipe pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Variabel tipe pemerintahan berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wau dan Ratmono (2015) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* (IFR) oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada 112 pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa berdasarkan ketersediaan dan keteraksesan dari *website* resminya. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi

logistik ordinal untuk variabel ketersediaan dan regresi berganda untuk variabel keteraksesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Variabel kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, dan kemandirian finansial pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Kemudian variabel kemandirian finansial pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada *website* pemerintah daerah.

**Tabel 2.1.**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Diani (2016)	Analisis Determinan Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi pada Pulau Jawa)	Y: Pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah X: Kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, <i>leverage</i> , kekayaan pemerintahan daerah, tipe pemerintahan daerah	1. Ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. 2. Kompetisi politik dan tipe pemerintahan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh

			pemerintah daerah.
Hanifah, dkk (2017)	Pengaruh Kompetisi Politik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan <i>Leverage</i> terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	Y: Ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah X: Kompetisi politik, IPM, <i>leverage</i>	1. Kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. 2. IPM berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah.
Medina (2012)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia	Y: Ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintah daerah X: Ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian pemerintah daerah, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, pendapatan per kapita	1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. 2. Rasio kemandirian pemda berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda, namun tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. 3. Rasio pembiayaan hutang



			<p>tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda, namun berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.</p> <p>4. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.</p> <p>5. Pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda.</p>
Ratmono (2013)	<p>Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan</p>	<p>Y: Ketersediaan dan keteraksesan <i>internet financial reporting</i> pemerintah daerah</p> <p>X: Ukuran pemerintah daerah, hutang pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, urbanisasi pemerintah daerah, ketergantungan finansial pemerintah daerah, opini BPK, belanja pemerintah daerah</p>	<p>1. Ukuran pemerintah daerah dan opini BPK berpengaruh negatif terhadap ketersediaan <i>internet financial reporting</i> pemerintah daerah.</p> <p>2. Hutang pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, urbanisasi pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah, tidak berpengaruh terhadap</p>

			<p>ketersediaan <i>internet financial reporting</i> pemerintah daerah.</p> <p>3. Belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan <i>internet financial reporting</i> pemerintah daerah.</p> <p>4. Tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan <i>internet financial reporting</i> pemerintah daerah.</p>
Rosita dan Arifin (2017)	Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah	<p>Y: Kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemerintah daerah</p> <p>X: Belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, <i>leverage</i> dan pendapatan asli daerah (PAD)</p>	<p>1. Belanja daerah dan umur administratif berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan .</p> <p>2. Kekayaan daerah, pendapatan per kapita dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemerintah daerah.</p> <p>3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemerintah daerah.</p>

Sinaga (2011)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	Y : Pelaporan keuangan di internet secara sukarela. X : Kompetisi politik, <i>size, leverage, wealth</i> , tipe pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetisi politik dan <i>leverage</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela.</li> <li>2. Kekayaan pemerintah tidak memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela.</li> <li>3. Ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela.</li> <li>4. Tipe pemerintah kabupaten memiliki pengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela.</li> </ol>
Wau dan Ratmono (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan <i>Internet Financial Reporting</i> oleh Pemerintah Daerah	Y: Ketersediaan dan Keteraksesan IFR X: Kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian finansial, pendapatan per kapita, opini audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan per kapita dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah.</li> <li>2. Kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, dan kemandirian finansial pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah.</li> </ol>

			<p>3. Kemandirian finansial pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR .</p> <p>4. Kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada <i>website</i> pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--

Sumber : Penelitian terdahulu

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

### 2.6.1. Pengaruh *Leverage* terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, dkk (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Diani (2016), dan Rosita dan Arifin (2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

*Leverage* mengindikasikan sejauhmana utang digunakan dalam struktur modal suatu organisasi (Brigham dan Houston, 1998). Tingkat *leverage* yang semakin kecil, maka semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya, dan semakin besar *leverage* semakin

menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai biaya operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Besarnya hutang menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan *internet financial reporting*. Pemerintah daerah menjadi berhati-hati dalam menyediakan informasi mengenai hutang yang dimiliki karena tidak ingin kinerjanya dinilai buruk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* pemerintah daerah, maka ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah akan cenderung lebih rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>1a</sub> : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.**

**H<sub>1b</sub> : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.**

### **2.6.2. Pengaruh Opini Audit terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wau dan Ratmono (2015) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah, namun tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap ketersediaan IFR.

Opini audit (pernyataan pendapat) dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat macam opini yang akan diberikan pemeriksa, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan menolak memberikan opini (Rusmana, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) berarti terdapat suatu ketidaksesuaian, bisa dalam hal tidak sesuai dengan SAP, pengungkapan, peraturan perundang-undangan, atau hal lainnya. Dengan memperoleh opini selain WTP tersebut maka dapat diasumsikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan belum baik, sehingga dapat memicu ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah rendah. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan belum baik, maka pemerintah daerah akan cenderung tidak menyediakan serta memberikan akses yang mudah terhadap *internet financial reporting*. Sebaliknya, jika laporan keuangan yang dihasilkan sudah baik, maka pemerintah daerah akan cenderung menyediakan dan memberikan akses terhadap *internet financial reporting* dalam *website*-nya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>2a</sub> : Opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.**

**H<sub>2b</sub> : Opini audit berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.**

### **2.6.3. Pengaruh Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) menyatakan bahwa rasio kemandirian pemda berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda, namun tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) dan Wau dan Ratmono (2015) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan *internet financial reporting*, namun berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.

Kemandirian finansial daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Halim, 2007). Kemandirian finansial pemerintah daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan manajemen pemerintahan yang baik, yakni dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya sendiri dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. Semakin tinggi kemandirian finansial pemerintah daerah, maka ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah cenderung tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>3a</sub> : Kemandirian finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.**

**H<sub>3b</sub> : Kemandirian finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.**